**BAB III**

**KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Kerangka ekonomi makro merupakan gambaran kondisi makro ekonomi tahun lalu hingga perkiraan tahun berjalan yang terdiri dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan serta proyeksi pencapaian indikator makro ekonomi untuk tahun 2025 yang akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor eksternal secara regional, nasional, maupun global.

Pencapaian target kinerja makroekonomi daerah tersebut tidak bisa terlepas dari kontribusi kerangka keuangan dan pendanaan daerah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun lalu dan kebijakan penganggaran hingga tahun berjalan akan menjadi basis untuk mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat analisis terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta proyeksi belanja dan pembiayaan daerah untuk tahun 2025.

Kerangka kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2025 diharapkan bisa menjadi jembatan antara fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah terindentifikasi di Provinsi Sumatera Barat.

## 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

#### **Kondisi Makro Ekonomi Daerah Tahun 2023**

Berbagai indikator menunjukkan kondisi perekonomian dunia semakin masih diliputi ketidakpastian sampai dengan akhir tahun 2023. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 telah melambat secara luas. Prospek pertumbuhan ekonomi global yang semula lebih baik dari perkiraan dengan cepat berubah menjadi kekhawatiran setelah invasi Rusia ke Ukraina dan konflik genosida di Palestina. Inflasi juga terus menanjak di banyak negara. Kenaikan terutama terjadi pada harga makanan dan energi. IMF menyebut, faktor tersebut membebani pertumbuhan ekonomi dan meredupkan prospek ekonomi ke depan. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 hanya mencapai angka 3%. Sementara itu rilis Bank Dunia edisi Desember 2023 memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5% pada tahun 2023. Angka ini relatif lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi hanya mencapai angka 2,1%.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 sekitar -1,6% akibat pandemi COVID-19 masih lebih baik dari nasional pada angka -2,07%. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,29% dan terus meningkat menjadi 4,36% di tahun 2022. Sedangkan secara keseluruhan di tahun 2023 berdasarkan data sangat sementara yang dikeluarkan BPS maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dengan capaian 4,62%. Peningkatan aktivitas masyarakat yang terjadi di sepanjang tahun 2023 mendorong terjadinya transaksi ekonomi terutama pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi.

Pertumbuhan PDRB per kapita pun yang sempat terkontraksi ke angka Rp. 43,70 juta di tahun 2020 kembali meningkat ke angka Rp. 45,41 juta di tahun 2021, terus meningkat ke angka Rp. 50,52 juta di tahun 2022 dan diprediksi meningkat ke angka Rp. 54,50 juta di tahun 2023. Sementara itu tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat cenderung stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terlalu terpengaruh oleh COVID-19. Hanya saja selama kurun waktu tahun 2022 tingkat inflasi di Sumatera Barat melonjak tajam ke angka 7,21%, namun angka ini kembali turun di tahun 2023 menjadi 2,47%.

Dari sisi ketimpangan, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan *Gini Ratio* cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam 5 tahun terakhir ke angka 0,300 pada tahun 2022 yang lalu dan turun ke angka 0,280 pada tahun 2023. Angka ketimpangan ini berada di bawah angka Gini Ratio Nasional pada kisaran 0,388 yang menunjukkan bahwa baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang. Sedangkan dari sisi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Willliamson, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung meningkat dari 0,266 ke angka 0,274. Kondisi pandemi COVID-2019 memperparah ketimpangan wilayah hingga angkanya naik menjadi 0,314. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik namun tidak serta merta menurunkan ketimpangan wilayah yang sedikit meningkat ke angka 0,315 dan menjadi 0,319 di tahun 2022. Kondisi ini diprediksi kembali sedikit meningkat ke angka 0,321 di tahun 2023.

Untuk aspek kemiskinan dan pengangguran, pemulihan ekonomi telah mengurangi jumlah penduduk miskin dari 364,79 ribu jiwa di tahun 2020 menjadi 339,93 ribu jiwa di tahun 2021. Namun kondisi ekonomi global memaksa terjadinya kenaikan harga bahan pokok yang kembali menambah jumlah penduduk miskin menjadi 343,82 ribu jiwa di tahun 2022. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak pada tingkat kemiskinan yang sempat berkurang dari 6,04% pada bulan September 2021 menjadi 5,92% di bulan Maret 2022, kembali meningkat ke angka 6,04% di bulan September 2022 namun kembali turun ke angka 5,95% di bulan Maret 2023. Sementara itu walalupun jumlah pengangguran bertambah 158 orang dari tahun 2021 kemudian berkurang sekitar 601 orang menjadi 179.505 orang penganggurandi tahun 2023. Angka ini menempatkan Tingkat Pengangguran Terbuka berkurang dari 6,52% menjadi 6,28% dan turun ke angka 5,94 di tahun 2023.

### **Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah**

Sinergi dan inovasi bauran kebijakan perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat ketahanan perekonomian nasional dari dampak rambatan perekonomian global yang semakin bergejolak ke depan. Ketegangan geopolitik dunia semakin memperburuk fragmentasi dan prospek ekonomi dan keuangan global. Berlanjutnya perang Rusia-Ukraina serta pengenaan sanksi terhadap Rusia menyebabkan terbatasnya pasokan dan karenanya sangat tingginya harga energi dan pangan dunia yang menyebabkan melambungnya inflasi global. Hal ini diperparah dengan konflik genosida di Palestina yang melebar ke daerah sekitarnya dan memicu ketegangan di jalur logistik global Laut Merah.

Akibat inflasi global ini akan mendorong bank-bank sentral di negara maju khususnya secara agresif meningkatkan suku bunga dalam mengetatkan kebijakan moneternya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia semakin melambat dan bahkan berisiko resesi seiring dengan menurunnya permintaan agregat karena pengetatan moneter dimaksud dan melemahnya daya beli konsumsi masyarakat karena tingginya inflasi. Persepsi risiko negatif di pasar keuangan global memburuk, mendorong para investor portofolio global menarik dananya dari sekuritas ke alat likuid (fenomena “*cash is the king*”), dan semakin memperburuk dampak rambatan ekonomi dan keuangan global, baik dari jalur perdagangan maupun jalur keuangan, terhadap negara EMEs, termasuk Indonesia.

Sementara itu, berlanjutnya perang dagang antara AS dengan Tiongkok serta pembatasan mobilitas terkait Covid-19 di Tiongkok semakin memperburuk gangguan mata rantai pasokan global dan perjalanan wisata Tiongkok ke berbagai belahan dunia. Tingginya fragmentasi politik dan ekonomi serta memburuknya gangguan mata rantai pasokan global tersebut telah menyebabkan dan akan semakin memperlemah pertumbuhan ekonomi global dari sisi penawaran. Sebagai akibat dari fenomena diatas perekonomian dunia ke depan diperkirakan akan melambat disertai dengan meningkatnya risiko resesi. Pertumbuhan dunia kembali direvisi menjadi 2,1% pada tahun 2023 dan cenderung meningkat ke angka 2,4% pada 2024. Semua negara mengalami perlambatan pertumbuhan, meskipun dengan tingkat yang berbeda.

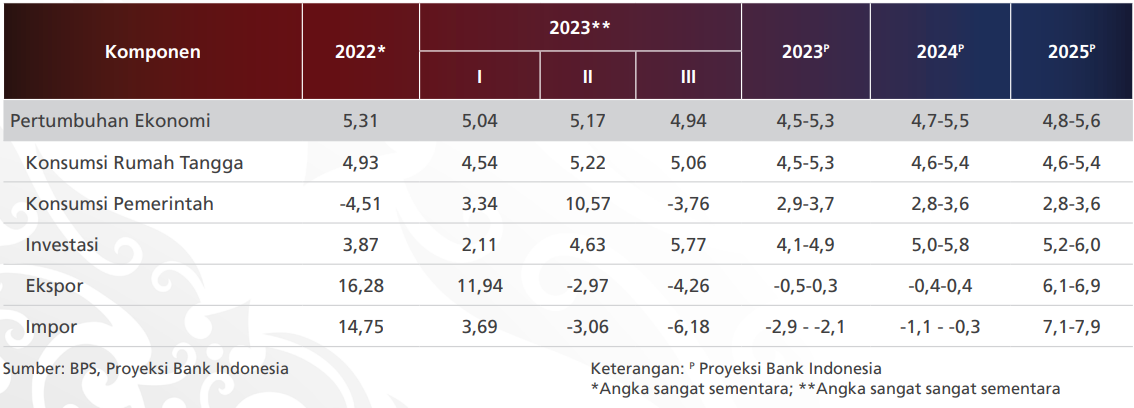
Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Desember 2023 disampaikan bahwa kawasan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina) secara keseluruhan dinilai yang paling menunjukkan ketahanan dari dampak rambatan global dengan proyeksi pertumbuhan yang stabil sebesar 5,0% pada tahun 2022 dan 2023 dan kemudian membaik menjadi 5,2% pada tahun 2024. Risiko koreksi pertumbuhan ekonomi dunia dan berbagai negara dapat terjadi apabila tingginya fragmentasi politik dan ekonomi terus berlanjut, serta pengetatan kebijakan moneter memerlukan waktu yang lebih lama untuk menurunkan inflasi di masing-masing negara.

Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Indonesia semakin solid dengan tumbuh di kisaran 4,7-5,5 persen pada tahun 2024 dan meningkat ke angka 4,8-5,6% di tahun 2025. Kestabilan geopolitik global dan nasional diharapkan tetap terjaga untuk mengejar level pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti sebelum pandemi. Ekonomi Indonesia tumbuh seiring permintaan domestik yang semakin membaik, ekspor yang menguat, dan stabilitas yang terjaga. Stimulus moneter yang ditempuh Bank Indonesia antara lain dengan menjaga suku bunga tetap rendah dan stabilitas nilai tukar.

Mobilitas penduduk yang kembali berjalan normal dan berkontribusi dalam membentuk iklim usaha yang kondusif dalam menopang perekonomian. Peningkatan permintaan domestik juga mendorong kenaikan inflasi yang diproyeksikan berada di kisaran 3±1 persen pada tahun 2023-2024. Hambatan dari sisi pasokan juga menyebabkan kenaikan harga bahan baku, energi, transportasi, dan makanan yang mendorong inflasi. Proyeksi kenaikan inflasi pada tahun 2023 dan 2024 bergantung pada pemulihan ekonomi dan perkembangan harga komoditas global. Pada tahun 2024 ini ekonomi Indonesia diharapkan mampu berakselerasi sejalan kebijakan yang ditetapkan pemerintah seperti percepatan transfromasi sektor riil, sinergi stimulus moneter dengan fiskal, transformasi sektor keuangan, digitalisasi ekonomi dan keuangan, dan *green economy*.

Tabel 3.1.

Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia 2022-2023



Perekonomian Sumatera Barat tahun 2024 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat terutama pada lapangan usaha perdagangan sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. *Outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2024 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 5,0%. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2024 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar 4,76%. Angka ini sendiri mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam perkembangannya merujuk kepada hasil perhitungan PDRB tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai angka 4,62%. Angka ini sedikit lebih rendah dari outlook Bappenas pada angka 5,0%. Untuk tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2025 diperkirakan berada pada angka 4,4 – 5,4 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan serta perhelatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2024 membawa kepastian pengambilan kebijakan ioleh pemerintah. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat. Proyeksi indikator makro daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2024-2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Makro dan Pembangunan** | **Realisasi** | | **Target** | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,36 | 4,62 | 5,00 | 5,05 |
| 2 | PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta) | 32,67 | 33,47 | 34,75 | 36,10 |
| 3 | PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta) | 50,52 | 53,92 | 57,94 | 62,29 |
| 4 | Indeks Gini (Rasio) | 0,292 | 0,291 | 0,290 | 0,289 |
| 5 | Indeks Williamson | 0,316 | 0,321 | 0,320 | 0,319 |
| 6 | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,04 | 5,95 | 5,83 | 5,65 |
| 7 | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | 343,82 | 340,37 | 338,70 | 330,84 |
| 8 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,28 | 5,94 | 5,75 | 5,55 |
| 9 | IPM | 75,16 | 75,80 | 76,67 | 77,41 |
|  | * Usia Harapan Hidup (Tahun) | 73,88 | 74,14 | 74,22 | 74,79 |
|  | * Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 14,10 | 14,11 | 14,12 | 14,13 |
|  | * Rata-rata Lama Sekoh (Tahun) | 9,18 | 9,28 | 9,37 | 9,46 |
|  | * Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu) | 11.130 | 11.380 | 11.547 | 11.719 |
| 10 | Inflasi (%) | 7,43 | 2,46 | 3,50 | 3,50 |

Sumber : Hasil Analisis, 2024

### **Arah Kebijakan Ekonomi Sumatera Barat**

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam *middle income trap*. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.
3. Pembangunan di sektor pertanian dan perdagangan yang merupakan sektor dengan distribusi PDRB yang dominan di Sumatera Barat diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.
4. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Kenaikan tingkat inflasi di tahun 2022 akan terus ditekan hingga kembali ke level sebelum pandemi. Program akselerasi perekonomian dan transformasi ekonomi akan berlanjut di tahun 2024 dan 2025 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, menurunkan tingkat ketimpagan antar wilayah, pengurangan kemiskinan, perluasan akses dan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kuallitas Sumber Daya Manusia yang diukur melalui peningkatan nilai IPM.

**3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 2025**

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus tantangan yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk menunjukkan kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Pada sub bab ini akan menguraikan mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

**3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Untuk Proyeksi Pendapatan pada tahun 2025, dianalisis berdasarkan dari capaian realisasi pendapatan yang sudah dilalui sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, serta target Pendapatan pada APBD tahun 2024 dan rencana tahun 2025.

Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **URAIAN** | **PERUBAHAN APBD 2023** | **REALISASI 2023** | **APBD 2024** | **PROYEKSI RAPBD 2025** |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | **6,476,334,990,207** | **6,263,971,826,408** | **6,586,576,217,900** | **7,611,087,000,000** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **3,034,554,065,207** | **2,784,868,190,769** | **3,118,242,050,900** | **2,632,049,454,160** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 2,463,434,564,594 | 2,236,722,695,545 | 2,554,336,907,537 | 2,271,388,175,331 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 22,691,509,656 | 16,049,240,433 | 384,295,538,231 | 360,661,278,829 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 117,277,113,555 | 117,084,599,941 | 125,495,605,132 | 125,495,605,132 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 431,150,877,402 | 415,011,654,850 | 54,114,000,000 | 54,114,000,000 |
|  |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **3,426,592,807,500** | **3,464,761,720,139** | **3,451,310,167,000** | **3,114,980,012,000** |  |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3,398,660,587,500 | 3,437,048,050,139 | 3,422,903,367,000 | 3,114,980,012,000 |  |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 27,932,220,000 | 27,713,670,000 | 28,406,800,000 | - |  |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **15,188,117,500** | **14,341,915,500** | **17,024,000,000** | **17,024,000,000** |  |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 15,188,117,500 | 14,341,915,500 | 17,024,000,000 | 17,024,000,000 |  |

Sumber : BPKAD PRovinsi Sumatera Barat

**A. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan (RPJMD)**

Berdasarkan arah dan kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka Pendanaan (RPJMD Tahun 2021-2026) diasumsikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah yang berkolerasi positif terhadap kemampuan perekonomian Masyarakat di Sumatera Barat diharapkan mengalami penigkatan dalam upaya pencapaian target di RPJMD. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang positif pasca Pandemi Covid-19 mencerminkan kehidupan ekonomi Masyarakat yang terus membaik. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek positif pada target rata-rata pertumbuhan PAD Provinsi Sumatera Barat dimana pada Tahun 2025 diproyeksi akan tumbuh sebesar 7.2%.
2. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer tersebut berupa Dana Bagi Hasil , DAU, Dana Alokasi Khusus dan dana-dana transfer lainnya. Sesuai dengan RPJMD maka pada Tahun 2025 pendapatan dana trasnfer di proyeksikan naik sebesar 1.63%. Proyeksi penerimaan dana transfer tidak dapat dipastikan terealisasi sesuai RPJMD tetapi realiasinya mengacu kepada penetapan alokasi oleh Pemerintah Pusat setiap tahunnya.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang juga merupakan Pendapatan dari Dana Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat/sejenis. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 dan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat, organisasi dan swasta sangat berpengaruh terhadap peneriman pendapatan. Sesuai RPJMD pertumbuhan penerimaan pada komponen ini pada Tahun 2025 diharapkan tumbuh 1.36 %.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan dituangkan pada Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

**Tahun 2019-2023 (Rp juta)**

| **Uraian** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PENDAPATAN DAERAH** | **6.390.337,20** | **6.364.149,76** | **6.706.054,85** | **6.122.357,61** | **6,263,971.83** |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **2.328.432,87** | **2.255.072,99** | **2.551.900,55** | **2.848.247** | **2,784,868.19** |
| Pendapatan Pajak Daerah | 1.872.933,99 | 1.809.809,96 | 2.060.852,02 | 2.407.807 | 2,236,722.70 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 19.475,96 | 7.926,60 | 9.102,05 | 11.889 | 16,049.24 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 94.938,38 | 94.747,26 | 81.266,83 | 100.651 | 117,084.60 |
| Lain-lain PAD Yang Sah | 341.084,54 | 342.589,17 | 400.679,64 | 461.211 | 415,011.65 |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | **4.045.668,56** | **4.046.974,19** | **4.128.407,47** | **3.188.121** | **3,464,761.72** |
| **Dana Perimbangan** | **4.027.349,12** | **4.002.552,88** | **4.077.691,92** | **3.160.399** | **3,428,427.03** |
| Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 106.119,22 | 145.620,97 | 182.002,55 | 176.649 | 186,817.96 |
| Dana Alokasi Umum | 2.076.398,19 | 1.891.323,98 | 1.952.740,33 | 1.877.995 | 1,989,337.43 |
| Dana Alokasi Khusus | 1.844.831,70 | 1.965.607,94 | 1.844.831,70 | 1.105.756 | 1,252,271.63 |
| **Transfer Dari Pusat Lainnya** | **18.319,45** | **44.421,31** | **50.715,54** | **-** | **-** |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 18.319,45 | 44.421,31 | 50.715,54 | - | **-** |
| **Transfer Antar Daerah** |  |  |  |  | **27,713.67** |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **16.235,77** | **62.102,58** | **76.462,38** | **85.990** | **14,341.92** |
| Pendapatan Hibah | 15.024,97 | 57.535,78 | - | 77.319 | 14,341.92 |
| Bantuan Keuangan | 1.210,80 | 4.566,80 | - | - | **-** |
| Pendapatan Lainnya | - | - | - | 8.671 | **-** |

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat jika dilihat dari kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 terlihat sangat fluktuatif. Penurunan pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat terjadi pada Tahun 2020, yakni penurunan sebesar -0,41 % dan Tahun 2022 sebesar -8,70%. Sedangkan kenaikan pertumbuhan pendapatan daerah terjadi Tahun 2021 sebesar 5,37 % dan tahun 2023 sebesar 2.31%.

Adapun penyebab terjadinya fluktuasi pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2020 terjadinya penurunan besaran realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari sebelumnya (Tahun 2019) sebesar Rp.2.076.398.191.000,- menjadi sebesar Rp.1.891.323.979.000 atau turun sebesar - 8,91%.
2. Penurunan realisasi besaran Dana Alokasi Umum (DAU) juga kembali terjadi pada Tahun 2022 dari sebelumnya Tahun 2021 sebesar Rp.1.952.740.330.000,- menjadi sebesar Rp.1.877.995.000.000,- pada tahun 2022 atau penurunan realiasi DAU sebesar -3,83 %.
3. Terjadinya penurunan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak / bagi Hasil Sumber Daya Alam dari sebelumnya pada Tahun 2021 sebesar Rp.182.002.550.000,- menjadi sebesar Rp.176.649.000.000,- pada Tahun 2022 atau turun sebesar -2,94 %.
4. Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui menurunnya pendapatan masyarakat pada Tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19 yang berakibat kepada kepatuhan dan kemampuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penurunan pendapatan dari pajak daerah sebesar - 3,15 %.

Akibat adanya penurunan alokasi Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2020, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai program dan inovasi untuk mendongkrak pendapatan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari upaya tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil melakukan lompatan kenaikan penerimaan PAD setiap tahunnya yang secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar sekitar 7.52% dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Meskipun terjadi kenaikan pendapatan daerah dari berbagai sumber tidak akan mencukupi untuk menutup kebutuhan belanja dengan adanya tambahan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti urusan pendidikan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan lainnya. Pembiayaan penambahan kewenangan pemerintah provinsi tidak dapat diandalkan dari pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu alokasi pembiayaan DAU, DAK atau dalam bentuk lainnya perlu ditingkatkan untuk membiayai pelimpahan urusan tersebut.

Adapun realisasi Belanja pada APBD Tahun 2019-2023 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.4**

**Realisasi Belanja Daerah**

**Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Rp juta)**

| **Uraian** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELANJA DAERAH** | **6,551,278.88** | **6,408,293.79** | **6,468,906.65** | **6,304,304.21** | **6,353,750.94** | **(0.75)** |
| **Belanja Operasi** | **4,576,156.01** | **4,460,427.08** | **4,728,173.16** | **4,137,693.97** | **4,422,018.65** | **(0.54)** |
| Belanja Pegawai | 2,170,912.46 | 2,081,587.32 | 2,093,837.76 | 2,078,501.67 | 2,195,331.45 | **0.34** |
| Belanja Barang dan Jasa | 1,524,405.21 | 1,229,706.71 | 1,703,252.65 | 1,980,942.86 | 1,966,520.51 | **8.69** |
| Belanja Bunga | - | - | - | - | - |  |
| Belanja Subsidi | - | - | - | - | - |  |
| Belanja Hibah | 880,838.34 | 1,149,133.05 | 931,082.75 | 67,416.43 | 260,166.69 | **51.16** |
| Belanja Bantuan Sosial | - | - | - | 10,833.00 | - |  |
| **Belanja Modal** | **1,062,230.45** | **736,888.36** | **666,352.12** | **965,288.14** | **990,627.83** | **1.82** |
| **Belanja Tidak Terduga** | **1,945.91** | **455,660.79** | **71,352.13** | **197.19** | **-** |  |
| Belanja Tidak Terduga | 1,945.91 | 455,660.79 | 71,352.13 | 197.19 | - |  |
| **Belanja Transfer** | **910,946.51** | **765,317.56** | **1,003,029.24** | **1,206,916.56** | **941,104.46** | **3.34** |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 877,337.64 | 764,437.56 | 963,100.94 | 1,123,088.17 | 908,031.79 | **2.65** |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 33,608.87 | 880.00 | 39,928.30 | 83,828.39 | 33,072.68 | **1,097.33** |
| **SURPLUS/ (DEFISIT)** | **(160,941.68)** | **(44,228.03)** | **237,146.80** | **(182,496.03)** | **(89,779.11)** |  |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

Selama periode 2019 s.d 2023 pertumbuhan rata-rata realisasi belanja daerah 0.75% namun bila dilihat secara tahunan terutama pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi , dimana pada tahun 2021 realisasi belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 0,95%, sedangkan untuk tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 2,54% dan naik lagi pada tahun 2023 sebesar 0.78%. Realisasi belanja tersebut di atas terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

**Tabel 3.5**

**Proporsi Belanja Daerah**

**Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan 2025 (Rp juta)**

| **Uraian** | **2024** | **2025** |
| --- | --- | --- |
| **BELANJA OPERASI** | **4,686,643,781,871** | **3,052,946,104,405** |
| Belanja Pegawai | 2,596,150,706,205 | 2,596,150,706,205 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1,808,037,125,332 | 374,862,999,000 |
| Belanja Subsidi | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 |
| Belanja Hibah | 275,955,950,334 | 75,432,399,200 |
| **BELANJA MODAL** | **782,793,429,669** | **3,789,249,601,542** |
| **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **46,942,466,244** | **20,000,000,000** |
| **BELANJA TRANSFER** | **1,301,640,715,165** | **716,303,497,137** |
| **BELANJA DAERAH** | **6,818,020,392,949** | **6,818,020,392,949** |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2024 ditargetkan belanja daerah sebesar Rp. 6,818 Triliun dengan komposisi 1) Belanja operasi sebesar Rp. 4,686 Triliun yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi dan belanja hibah, 2) belanja Modal, 3) Belanja tidak terduga, dan 4) Belanja Transfer.

**Tabel 3.6**

**Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

**Tahun 2019-2023 (Rp juta)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)** |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **563,774.67** | **337,485.66** | **261,533.76** | **483,680.53** | **289,279.69** | **(4.47)** |
| Penggunaan SiLPA | 502,062.67 | 332,762.66 | 261,533.76 | 483,680.53 | 289,279.69 | **(2.59)** |
| Pinjaman Dalam Negeri | 61,712.00 | 4,723.00 | - | - | - |  |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **74,441.10** | **32,407.00** | **15,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **(19.21)** |
| Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 20,413.10 | 20,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | **(19.21)** |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 54,028.00 | 12,407.00 | - | - |  |  |
| **PEMBIAYAAN NETTO** | **489,333.57** | **305,078.66** | **246,533.76** | **463.680.53** |  |  |
| **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SEBELUM KOREKSI** | **328,391.90** | **256,028.62** | **483,680.53** | **281,184.50** |  | **8.34** |
| **KOREKSI SiLPA** | - | - | - | - |  |  |
| **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN** | **328,391.90** | **256,028.62** | **483,680.53** | **281,184.50** |  |  |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dari realisasi penerimaan pembiayaan dapat dilihat bahwa pertumbuhannya berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -4.47%. Penurunan yang sangat signifikan adalah pada tahun 2021 yakni sebesar – 22.51% dan tahun 2023 sebesar 40.19%. Pelampaun penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan yang lebih besar daripada dianggarkan. Sebaliknya, kekurangan penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan lebih rendah daripada anggaran.

**B. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Hasil Analisis Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 merupakan penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

**Tabel 3.7**

**Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah**

**RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

| **No.** | **Uraian** | **Proyeksi RPJMD Tahun 2025**  **(Rp Juta)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 3.082.234 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 4.431.356 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 97.497 |
|  | **Jumlah Pendapatan Daerah** | **7.611.088** |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan arah dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026, maka proyeksi pendapatan daerah pada RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar Rp.7.611.088.000.000,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.3.082.234.000.000,- ,Pendapatan Transfer sebesar Rp. 4.431.356.000.000,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.97.497.000.000,-

Dari ke-3 (ketiga) komponen Pendapatan Daerah tergambar bahwa Pendapatan Transfer merupakan komponen utama pendapatan daerah (58 %), selanjutnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) berkontribusi sebesar 41 % dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi sebesar 1 % terhadap pendapatan daerah Tahun 2025.

Proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**

**Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

| **Uraian** | **Proyeksi Tahun 2025 (Rp. Juta)** |
| --- | --- |
| **PENDAPATAN** | 5,764,054 |
| Pendapatan Asli Daerah | 2,632,050 |
| Pendapatan Transfer | 3,114,980 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 17,024. |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Secara akumulatif proyeksi pendapatan daerah Tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp.1.847.034.000.000 dari proyeksi RPJMD yakni sebesar - 24.27% yang dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3.9**

**Proyeksi/ Target Penerimaan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

**(dalam Rp. Juta)**

| **Uraian** | **Proyeksi RPJMD**  **Tahun 2025 (Rp)** | **Proyeksi RKPD Tahun 2025 (Rp)** | **Selisih (Rp)** | **Ket** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PENDAPATAN** | **7.611.088** | **5,764,054** | **-1,847,034** |  |
| Pendapatan Asli Daerah | 3.082.234 | 2,632,050 | -450,184 |  |
| Pendapatan Transfer | 4.431.356 | 3,114,980 | -1,316,376 |  |
| Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 97.497 | 17,024 | -80,473 |  |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 3.10**

**Penghitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

| **Uraian** | **Proyeksi RPJMD Tahun 2025**  **(Rp Juta)** | **Proyeksi RKPD Tahun 2025**  **(Rp Juta)** | **Selisih**  **(Rp Juta)** | **Ket** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELANJA OPERASI** | **5.550.617** | **3,052,946** | **(2,497,671)** |  |
| Belanja Pegawai | 2.628.823 | 2,596,151 | (32,672) |  |
| Belanja Barang dan Jasa | 2.006.607 | 374,863 | (1,631,744) |  |
| Belanja Subsidi | 6.900 | 6.500 | (400) |  |
| Belanja Hibah | 908.287 | 75,432 | (832,855) |  |
| **BELANJA MODAL** | **1.065.835** | **3,789,250** | **2,723,415** |  |
| **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **50.000** | **20.000** | **(30,000)** |  |
| **BELANJA TRANSFER** | **946.656** | **716,304** | **(230,352)** |  |
| **TOTAL BELANJA DAERAH** | **7.613.108** | **6,818,020** | **(795,088)** |  |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

Memperhatikan tabel di atas secara total proyeksi belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp.6.818.020 juta, mengalami penurunan sebesar Rp.795.088 juta atau 10,44% dari belanja daerah yang diprediksi dalam RPJMD untuk Tahun 2024 sebesar Rp.7.613.108 juta. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan Belanja Hibah sebesar 91,70% dimana pada RPJM sudah diproyeksikan sebesar Rp. 908.287juta sedangkan dalam proyeksi Tahun 2025 sebesar Rp. 75,432 juta. Hal ini sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi belanja Infrastruktur 40% dari total belanja daerah dan belanja Earmak lainnya yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi. Kenaikan belanja tidak terduga sebesar Rp.20.000 juta atau 40,00% guna antisipasi dalam menghadapi keadaan darurat mendesak baik disebabkan bencana alam, bencana non alam maupun keadaan yang tidak direncanakan lainnya.

**C. Analisis Keuangan Daerah Dalam Penyusunan RKPD**

Hasil Analisis Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 merupakan Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

**3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

1. **Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah akan menentukan hasil yang dapat dicapai daerah. Secara umum untuk peningkatan Pendapatan Daerah tersebut dibutuhkan berbagai kebijakan sesuai dengan kondisi riil sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa sumber utama PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berasal dari Pajak Daerah. Pemungutan terhadap sumber Pajak Daerah tersebut dilakukan berdasarkan *Self assessment system* dan *Official Assessment System*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan. Sedangkan *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiscus (Kepala Daerah) atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Dari 5 jenis Pajak Daerah provinsi, 3 jenis diantaranya dipungut berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan. Dengan demikian, potensi ketiga jenis Pajak Daerah ini dapat dihitung dengan pasti berdasarkan besaran ketetapan. Besar kecilnya peningkatan ketiga sumber pendapatan ini sangat dipengaruhi kondisi ekonomi dan kepatuhan wajib pajak. Seandainya perekonomian Indonesia segera pulih, maka masyarakat membutuhkan kendaraan baru dan PLN menggunakan Air Permukaan yang lebih banyak untuk menghasilkan listrik sehingga pajak dari ketiga sumber ini juga meningkat.

Kelemahan untuk meningkatkan sumber penerimaan dari ketiga sumber Pendapatan Asli Daerah ini mungkin hanya dalam proses pemungutan, terutama disebabkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan inilah yang harus ditingkatkan, antara lain dengan meningkatkan razia kendaraan bermotor dan memberikan ampunan denda atau pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak Daerah provinsi lainnya adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok yang dipungut berdasarkan *self assessment system*. Pajak rokok merupakan pajak daerah yang pemungutannya bersamaan dengan pungutan cukai rokok yang dilakukan oleh kementerian keuangan c.q Dirjen Bea Cukai. Tarif pajak rokok adalah 10% dari cukai rokok yang pendistribusiannya ke daerah didasarkan pada koefisien jumlah penduduk. Sedangkan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Wajib Pungut. Dengan demikian, upaya peningkatan pendapatan daerah dari kedua sumber ini relatif terbatas karena sudah dipungut oleh wajib pungut yang kompeten dan terpercaya.

Potensi Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terutama berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Namun demikian, tidak banyak kekayaan daerah yang dapat digunakan untuk menghasilkan retribusi daerah. Karena, kebanyakan aset tersebut digunakan untuk operasional kegiatan pemerintahan sehingga tidak mungkin digunakan untuk meningkatkan Retribusi Daerah. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menginventaris ulang seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mamastikan pemanfaatan dan atau optimalisasi penggunaannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki 8 BUMD, namun tidak semua BUMD tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Bagaimana pun laba atau rugi yang dihasilkan BUMD tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian Indonesia. BUMD yang saat ini masih dapat memberikan PAD dalam masa pandemic-COVID 19 hanya dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT.Bank Nagari), Askrida, dan Jamkrida Sumatera Barat. Kecendrungan atau tren deviden yang diterima Provinsi Sumatera Barat pun mengalami penurunan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatkan kinerja, terutama BUMD yang belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, antara lain dengan meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan BUMD.

Lain-lain PAD yang Sah diharapkan dapat ditingkatkan melalui RSUD yang saat ini sudah dikelola sebagai BLUD. Walaupun peningkatan pendapatan RSUD terpengaruh dengan Sistem Rujukan Berjenjang yang diterapkan BPJS kesehatan saat ini, namun peningkatan pelayanan yang diberikan oleh RSUD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari pelayanan Kesehatan Non-BPJS.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya terbatas kepada pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan dana APBN, antara lain dengan menyusun usulan atau proposal untuk mendapatkan sumber dana DAK. Dengan demikian, arah kebijakan Pendapatan Daerah dalam 2021-2026 adalah:

1. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melalui :
   1. Mengembangkan pelaksanaan *Payment Point System* bekerjasama dengan Bank Nagari, dan Bank Pemerintah lainnya pada seluruh kantor SAMSAT di Sumatera Barat dalam rangka Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak.
   2. Mengoperasikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kantor-kantor SAMSAT Nagari di seluruh Kabupaten yang mempunyai wilayah jauh dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada pemilik kendaraan bermonotor atau wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
   3. Mengoperasikan Mobil Pelayanan SAMSAT Keliling untuk menjangkau pelayanan Pembayaran PKB/BBNKB ke daerah yang jaraknya jauh dari Kantor SAMSAT.
   4. Melakukan pembebasan Denda PKB/BBNKB untuk periode waktu tertentu.
   5. Melakukan pembebasan BBNKB II bagi Kendaraan Bermotor luar Provinsi Sumatera Barat untuk periode waktu tertentu.
   6. Melaksanakan Razia Terpadu PKB/BBNKB secara rutin dan berkesinambungan.
   7. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dit Lantas Polda Sumatera Barat dan PT. Jasa Raharja dan melibatkan PT. Bank Nagari, dalam rangka kelancaran urusan pelayanan kepada masyarakat pada seluruh kantor SAMSAT se Provinsi Sumatera Barat.
   8. Meningkatkan kinerja pelayanan pada kantor UPT/SAMSAT dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor UPT-UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara berkala dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan baik pelayanan *online* maupun pelayanan yang dilakukan secara *offline.*
   9. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas terkait tentang tugas pelayanan dilapangan.
   10. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian secara rutin dan langsung terhadap semua tugas pada semua UPT.
   11. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka inventarisasi aset kendaraan bermotor yang menjadi Objek Pajaknya.
   12. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek Pajak Kendaraan Bermotor melalui status objek pajak.
   13. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan pendataan potensi, evaluasi penerimaan dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi pada seluruh OPD Dinas/Instansi pengelola pelayanan Retribusi serta menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.
4. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan berbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
5. Meningkatkan pelaksanaan *Good Coorporate Governance* (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan jumlah deviden kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih *idle* dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan konstribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
7. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh OPD Dinas/Instansi yang berkaitan dengan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terutama OPD Dinas/Instansi Pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Pelayanan Persampahan, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga dapat meningkatan penerimaan dan berkonstribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
8. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil.
9. Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan DID, IPDMIP, PHJD, Hibah dan lainnya serta sumbangan Pihak Ketiga.
10. **Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Arah Kebijakan Belanja Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah :

1. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
2. Selanjutnya direncanakan alokasi untuk pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat, alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan diantaranya dibidang pendidikan, kesehatan, mendukung kedaulatan pangan, pengembangan pariwisata, perdagangan dan UMKM, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta prioritas lainnya yaitu pembangunan mental dan reformasi birokrasi.
3. Alokasi belanja untuk mendanai alokasi Belanja Operasi dan Belanja Transfer untuk mendukung program prioritas di provinsi yang bukan kewenangan provinsi seperti untuk bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa/nagari, belanja hibah dan bantuan sosial
4. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan Pendapatan Daerah.

Disamping itu kebijakan alokasi belanja pada rancangan APBD Tahun 2025 adalah:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan urusan wajib seperti urusan pendidikan 20% dari APBD, urusan kesehatan, belanja Peningkatan Kompetensi SDM belanja urusan wajib lainnya dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan belanja modal dari APBD yang lebih banyak difokuskan pada pelayanan dasar serta infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pemerintah Daerah menganggarkan 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Provinsi yang diutamakan penggunaannya untuk perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran Pekerja bukan Penerima upah (PBPU) dan bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan dalam kepesertan JKN menuju *Universal Health Coverage*
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan dan monitoring mengalokasikan anggaran untuk Inspektorat/APIP. Untuk itu dalam rangka mendanai program dan kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat terus diupayakan pengalokasian anggaran mencapai sebesar 0,60% dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan
4. Selain itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan belanja yang merupakan mandatory dari pemerintah pusat antara lain pemenuhan SPM pada Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Bidang Sosial. Selain itu juga di fokuskan serta mendukung dalan penanganan stunting, pengentasan kemiksinan ekstrem serta beberapa mandatory lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengalokasikan dukungan anggaran program strategis yang diamanatkan peraturan perundangan antara lain: 1) dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI); 2) dalam rangka pembentukan dan mendukung pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mencapai peningkatan Indeks Inklusif keuangan; 3) dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, dengan mendukung tugas TPID serta pengendalian harga barang dan jasa.
6. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memperhatikan alokasi anggaran dalam rangka memajukan perpustakaan, penyelamatan dan pelestarian arsip negara, penganggaran program inovasi daerah, serta alokasi anggaran dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan grand design reformasi birokrasi 2021-2025.
7. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan prioritas pembangunan sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan mempedomani agenda / priorotas pembangunan yang terdapat dalam RPJM Nasional yang tersebar pada urusan wajib dan urusan pilihan.
8. Menganggarkan untuk program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
9. Mempriortaskan alokasi anggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung-gedung strategis daerah serta infrastruktur yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Adapun proyeksi belanja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**

**Proyeksi/Target Belanja Provinsi Sumatera Barat**

**Tahun 2024 s/d 2025**

| **URAIAN** | **BELANJA DAERAH TAHUN 2024 (Rp)** | **PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2025 (Rp)** | **+/-**  **(Rp)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **BELANJA OPERASI** | **4,686,643,781,871** | **3,052,946,104,405** | (1,633,697,677,466) | (34.86) |
| Belanja Pegawai | 2,596,150,706,205 | 2,596,150,706,205 | - | - |
| Belanja Barang dan Jasa | 1,808,037,125,332 | 374,862,999,000 | (1,433,174,126,332) | (79.27) |
| Belanja Subsidi | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | - | - |
| Belanja Hibah | 275,955,950,334 | 75,432,399,200 | (200,523,551,134) | (72.67) |
| **BELANJA MODAL** | **782,793,429,669** | **3,789,249,601,542** | 3,006,456,171,873 | 384.07 |
| **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **46,942,466,244** | **20,000,000,000** | (26,942,466,244) | (57.39) |
| **BELANJA TRANSFER** | **1,301,640,715,165** | **716,303,497,137** | (585,337,218,028) | (44.97) |
| **Total Belanja** | **6,818,020,392,949** | **6,818,020,392,949** | - | - |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

1. **Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan Kebutuhan Daerah, dan jumlah setiap Tahun Anggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah yang sebelumnya dilakukan analisis penyertaan modal.
3. Dalam rangka pembentukan dan atau memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan penyertaan modal dan atau menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
5. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Adapun proyeksi pembiayaan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12**

**Proyeksi/Target Belanja Provinsi Sumatera Barat**

**Tahun 2024 s/d 2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **URAIAN** | **APBD 2024** | **PROYEKSI RAPBD 2025** | **TAMBAH/KURANG** | **%** |
|  | **PEMBIAYAAN DAERAH** | **231,444,175,049** | **130,000,000,000** | **(101,444,175,049)** | **(43.83)** |
| **1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **251,444,175,049** | **150,000,000,000** | **(101,444,175,049)** | (40.34) |
|  | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 251,444,175,049 | 150,000,000,000 | (101,444,175,049) | (40.34) |
| **2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **20,000,000,000** | **20,000,000,000** | **-** | - |
|  | Penyertaan Modal Daerah | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | - |
|  | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **20,000,000,000** | **20,000,000,000** | - | - |
|  | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | - | - | - |  |
|  |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat